Moeslim Abdurrahman

Islam Yang Memihak

LKiS

ISLAM YANG MEMIHAK
Moeslim Abdurrahman

xvi + 210 halaman; 12 x 18 cm
1.Kehidupan beragama 2. Tranformasi Islam
ISBN: 979-8451-18-X

Editor: Qamaruddin SF
Rancang sampul: Haitami el-Jaid
Setting/*layout*: Santo

Penerbit:
***LKiS* Yogyakarta**
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194, 7472110
Faks.: (0274) 387194
e-mail: elkis@indosat.net.id

Cetakan I: Maret 2005

Percetakan dan distribusi:
PT *LKiS* Pelangi Aksara Yogyakarta
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194, 7472110
Faks.: (0274) 387194
e-mail: elkis@indosat.net.id

Islam Agama Nilai

Salah satu fungsi terpenting dari munculnya Islam adalah sikap korektif terhadap sejarah yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Distorsi sejarah yang menyimpang semacam inilah yang disebut sebagai bentuk dehumanisasi yang dalam bahasa Al-Qur'an ditengarai dengan "proses kemusyrikan". Inilah tema Al-Qur'an paling menonjol yang turun di Makah sebagai peringatan terhadap bahaya kemusyrikan sebagai lawan dari kemanusiaan dan peradaban. Oleh karena itu, kalau kita hendak melakukan rekonstruksi pesan dasar Al-Qur'an, sebenarnya sama halnya kita harus memperjuangkan terus-menerus pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, Islam sesungguhnya adalah agama yang prinsip-prinsipnya tidak hanya didasarkan pada ritual atau spiritual spekulatif, tapi sesungguhnya yang paling fundamental ialah menjaga agar nilai-nilai kemanusiaan tidak dimanipulasi atau secara moral diselewengkan oleh sejarah.

Sesungguhnya, jika pesan Islam bisa dibaca seperti itu maka tidak ada alasan mengapa Islam harus eksklusif dengan proses humanisasi. Tatkala Al-Qur'an diturunkan, sudah tentu hal ini bukanlah awal dari kebenaran. Atau, awal munculnya suatu peradaban. Muhammad diutus dengan misi profetiknya untuk meluruskan sejarah penuh distorsi kemanusiaan yang paling radikal di kawasan budaya Arab, yang disebut sebagai jahiliyah. Artinya, Muhammad harus merekonstruksi nilai-nilai peradaban yang runtuh yang sebelumnya telah diletakkan dasar-dasarnya oleh para nabi, terutama peradaban monoteisme yang pilarnya disebut "*millah* Ibrahim". Apa yang harus dikatakan dengan konteks ini bahwa sesungguhnya tidak ada yang unik dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam berkaitan dengan nilai universal yang dijunjung oleh umat manusia selama ini yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut-sebut bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'âlamîn,* suatu pernyataan yang umum, bukan yang partikularistik tentang apa yang disebut misi *risâlah islâmiyyah.*

Tatkala di Madinah, Rasulullah mencoba membangun model keumatan yang ideal. Model tersebut didasarkan pada prinsip saling menghargai dan saling membagi tanggungjawab untuk menegakkan cita-cita nilai Islam Makiyah yang menekankan

perlunya dibentuk masyarakat *muttaqîn.* Suatu utopian Islam yang menjaga kesetaraan umat di depan Tuhannya dan sekaligus melindungi setiap martabat umat manusia dalam kehidupan bersama. Tidak hanya itu, bahwa kesetaraan di depan Allah juga harus diwujudkan dalam kesetaraan hidup yang nyata. Dalam hal ini, tentang pentingnya keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang tidak hanya melindungi hak-hak pribadi, tetapi karena kekayaan merupakan titipan dari Tuhan, sehingga ada fungsi sosial yang harus ditunaikan sebagai ungkapan solidaritas dan penghormatan terhadap nilai kolektivitas, pilar penting suatu keumatan.

Dengan begitu, sesungguhnya *tauhîd* tidaklah semata-mata konsep teologis yang vertikal, tapi juga merupakan moralitas yang paling dasar untuk membangun ideologi politik, bahwa ketimpangan ekonomi merupakan ancaman kemanusiaan yang serius. Oleh karena itu, Nabi dan para khalifah—penggantinya—sangat peduli dan mengambil langkah yang tegas untuk mengawasi distribusi ekonomi dan sosial ini, yang saat itu dengan mekanisme zakat dan kewajiban pajak bagi kaum nonmuslim yang tidak boleh tidak harus menunaikannya. Gambaran tentang wahyu yang turun di Makah yang menekankan pentingnya nilai *tauhîd*

(baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal) tadi, sebagai lawan dari kemusyrikan dan bagaimana wahyu Madaniyah yang memberi hidayah Nabi melakukan eksperimentasi membentuk masyarakat baru yang ideal, secara gampangnya dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam yang diperjuangkan selama ini pada dasarnya, sekali lagi, bukanlah hal yang unik di luar nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.

Jadi, apa yang berbeda antara Islam dan umat Islam dan sejarah umat lain di luar Islam? Sudah tentu, seperti yang dikatakan di atas, dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, Islam dan umat Islam harus berjuang bersama kekuatan kemanusiaan yang lain untuk menghadang dehumanisasi dan sejarah peradaban yang menyimpang. Dalam perspektif nilai Islam, keadaan seperti itu tidak bisa ditawar. Biarpun misalnya distorsi kemanusiaan itu terjadi dalam sejarah umat Islam sendiri. Jika kita baca perkembangan sejarah, berbagai imperium Islam pernah melakukan hal ini dan dalam waktu yang bersamaan kelompok Islam dengan panggilan *al-amar bil ma'rûf an-nahyî `anil munkar* juga muncul untuk melakukan koreksi sejarah dan untuk mengembalikan panggilan Islam yang suci.

Oleh karena itu, harus dipisahkan mana nilai Islam, mana sejarah Islam, dan mana sejarahnya

orang lain yang dalam hal ini kita harus menghormati sejarah setiap umat yang berbeda-beda. Islam sesungguhnya tidak hanya memiliki kepedulian yang inklusif pada tingkat memperjuangkan nilai harkat dan martabat kemanusiaan (dan ini sudah dibuktikan bahwa Islam membuka seluas-luasnya), bahkan lebih dari itu, menganjurkan perlunya membangun kerja sama di bidang peradaban sehingga muncul suatu kehidupan umat manusia yang bercorak transkultural yang damai dan saling menghargai. Bentuk peradaban semacam itu merupakan cita-cita ideal yang islami, karena dengan itu bisa disangga oleh siapa pun yang mencintai kemanusiaan sebagai anugerah Yang Mahakuasa.

Sekali-kali Islam memang dan terus akan menekankan bahwa tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada penindasan, dan tidak boleh ada kekerasan selama akal sehat dan hati nurani kemanusiaan itu masih bisa tumbuh secara wajar dan selama hegemoni dan eksploitasi tidak menjadi ancaman yang serius buat kemerdekaan dan pemerdekaan umat manusia.

Islam sesungguhnya adalah agama yang pro-nilai universal. Tanpa harus mengingkari bahwa umat Islam mempunyai sejarah komunitasnya sendiri, tapi jangan lupa tanpa komitmen Islam memperjuangkan kebenaran yang universal itu

maka Islam akan jatuh sekedar menjadi agama komunitas.

Oleh karena itu, setiap bentuk interpretasi dan reinterpretasi Islam dalam sejarah haruslah ditransendensikan pada cita-cita kemanusiaan yang lebih tinggi, yang bisa dihayati oleh siapa saja, yang percaya bahwa hal itu merupakan ungkapan keimanan yang paling ideal. Konsekuensi dari cita-cita Islam seperti ini, kita harus berani secara korektif menghalangi agar setiap bentuk formalisme Islam janganlah identik untuk mereduksinya menjadi identitas atau bagian dari proses sejarah komunitas yang sempit.

Saya sungguh senang bahwa kesadaran intelektual muda Islam yang kesadarannya lebih inklusif sekarang ini tumbuh dengan menggembirakan. Biarpun, bisa jadi gejala kembalinya kesadaran Islam yang terbuka semacam ini ada juga yang mengkhawatirkan (karena takut tidak autentik atau mengancam jati diri komunitas), namun kalau kita konsisten bahwa Islam adalah agama unversal, maka dengan sendirinya siapa yang mengaku menjadi pengikutnya juga harus berlandaskan cita-cita kemanusiaan yang universal. Itulah Islam agama umat manusia, biarpun secara fiqh-nya mungkin banyak orang tidak bersaksi diri secara

formal bahwa mereka adalah umat Islam. Akan tetapi, mereka menjalankan nilainya lebih dari sekadar formalitas permukaan. Islam substantif, menurut saya, pada dasarnya adalah syari'at kemanusiaan yang mementingkan ide Tuhan dalam emansipasi dan humanisasi daripada kepentingan identifikasi, siapa kita dan siapa mereka.

Islam dan Perubahan Sosial

Pada dasarnya, keberagamaan adalah sebuah proses bagi setiap orang yang mengaku religius. Proses ini sudah tentu sangat dipengaruhi oleh tradisi dan lingkungan sosial dengan segala perubahannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari *human consciousness,* agama sebagai bentuk kesadaran manusia sesungguhnya tidak bermula dari kesadaran itu sendiri yang menentukan "*their being*", tapi "*their social being*"-lah yang membentuk kesadaran mereka.

Jika pernyataan itu benar, konsekuensinya banyak orang mempunyai kesadaran beragama, namun sebenarnya kesadaran itu hanya sekadar ikut-ikutan (ikut merasa saleh dan bertakwa), tanpa kepekaan transendental yang substansif. Yakni, tentang tujuan keberagamaan bagi perjuangan manusia untuk menciptakan sejarah yang lebih adil bagi harga dan harkat diri kemanusiaan. Inilah bahayanya keberagamaan yang "semu" tatkala

pengalaman dan romantisme ritual menentramkan batin seseorang, sambil membunuh kepekaan orang itu sebagai *human agency* yang bertanggung jawab melaksanakan tugas kekhalifahan di dunia. "*Manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri,*" kata Allah. Oleh sebab itu, setiap orang lahir adalah untuk dirinya sendiri dalam proses sejarah yang dilaluinya.

Dalam Islam selalu dikatakan bahwa setiap orang lahir dalam keadaan *fithrî,* tidak memiliki dosa sejarah. Begitu pula, setiap orang (dalam hati dan naluri kemanusiaannya) mempunyai tendensi *hanîf,* yakni prokemanusiaan dan kebenaran. Akan tetapi, tatkala manusia mulai meneguk sejarah dan lingkungan sosialnya, kesadaran bahwa manusia adalah *his/her own creator on his/her own history of social justice* tidak serta merta tumbuh sebagai kesadaran, tanpa adanya proses penyadaran. Sebab, kesadaran-kesadaran seperti itu baru muncul jika terjadi rekonstruksi yang sengaja harus dibangun secara aktif dan tidak akan lahir dengan sendirinya dari setiap individu.

Pertanyaannya, apakah mode interpretasi agama dan pedagogisnya (baca: dakwah) selama ini substansinya memang untuk membangkitkan kesadaran agama yang memberi arah transformatif, ataukah malah sebaliknya mengekang kreativitas

kemanusiaan atau bahkan membuat para pemeluknya lari dari tanggungjawab sosial, dengan dalih mencari ketenteraman spiritual yang eskapistik.

Perubahan sosial umat beragama dewasa ini, dalam era kapitalisme global yang tidak mengenal batas wilayah hunian manusia dan tradisi lokalnya, telah terjadi secara radikal. Dalam keadaan seperti ini, tidak hanya kapital yang sulit dibatasi larinya ke mana-mana mencari tempat di mana hitungan untung secara kapitalistik telah menjadi pertimbangan utama, tapi juga kekuatan kapital itu telah mempunyai akibat terhadap aspek sosial dan kemanusiaan yang lain.

Diasporanya umat manusia dari negara-negara miskin pergi dengan segala risiko mengadu untung untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara maju. Kisah penderitaan mereka, kadang-kadang tidak menjadi perhatian media, selama media dunia sebenarnya lebih suka memberi ruang untuk iklan atau juga peperangan yang di belakangnya ada kepentingan promosi: apakah itu bagian dari mengguritanya *the consumer culture* ataukah bagian dari pertarungan industri senjata? Lebih dari itu, kapitalisme global sekarang ini tak saja meneguhkan ketimpangan sosial dan ekonomi dan melahirkan gaya hidup yang penuh risiko, tapi juga—yang tidak kalah bahayanya—telah memun-

culkan berbagai ketidakpastian. Dari berbagai ketidakpastian yang paling merisaukan, sesungguhnya berkenaan dengan desakan untuk mempertanyakan "kepastian iman" kita saat berhadapan dengan pluralitas kebenaran, pluralitas jati diri dan sosial, serta pluralitas pengalaman menghadapi kenyataan objektif dari pergulatan hidup sehari-hari.

Dalam era global seperti itu, "keislaman", misalnya, juga tidak lagi menjadi identitas dan pengalaman keberagamaan yang monolitik bagi kaum muslim, seperti sebelumnya. Sebab, perubahan sosial telah menyajikan pilihan-pilihan kesadaran yang pluralistik, sekaligus kadang-kadang membingungkan, sehingga mendatangkan kegamangan untuk memilih, atau mungkin lebih baik memilih satu saja interpretasi kebenaran, sambil menegasikan yang lain, agar yakin secara totalistik. Banyak orang sulit menerima, mana mungkin "kebenaran" *kok* banyak dan tidak tunggal, *toh* asal kebenaran itu satu dari Yang Mahabenar. Tentu, sambil melupakan bahwa sesungguhnya kita semua hidup dalam "sejarah tentang kebenaran". Makanya, tidak mungkin kalau iman dan kebenaran yang merupakan pengalaman dan pemahaman empirik yang merupakan bagian dari *human interpretation* itu harus diabsolutisasi secara transendental. Sementara tugas manusia yang terpenting hanyalah melak-

sanakan tindakan iman (*just as an act of faith*) dalam hidup yang objektif dan bukan menjadi Tuhan, pemilik kebenaran yang sejati.

Pluralisme, memang, menggerogoti semua kepastian. Apalagi, kalau hal ini dikaitkan dengan ukuran moral dan keyakinan agama. Sebab, pluralisme telah mengancam wilayah otoritas yang baku, yang berkuasa. Oleh karenanya, mungkin banyak orang mau menerimanya dalam kaitannya dengan urusan hidup sehari-hari, seperti dalam soal bisnis. Namun, sekali lagi, bukan dalam hal etika, moral, dan keyakinan. Masyarakat Indonesia, saya kira, saat ini dalam transisi untuk menerima pluralisme dan pluralitas ini. Antara percaya dan tidak percaya, antara menerima dan tidak menerima terhadap berlangsungnya proses perubahan sosial ini. Seolah-olah, lebih baik dipisah saja antara kenyataan yang objektif itu dengan dunia moralitas individu, atau dalam reaksi yang lebih keras bahwa "ketidakpastian kebenaran" itu haruslah dilawan dengan "gerakan kepastian yang lebih pasti" yang kemudian muncul dengan jawaban fundamentalisme secara eksklusif.

Dalam wacana Islam publik, soal "Islam pluralis" memang sudah muncul dan diperbincangkan secara serius. Biarpun kalau diikuti belum terlalu jelas arahnya, apakah isu ini sekadar untuk

menghidupkan sikap saling menghargai (toleransi) di antara mereka yang berbeda paham dan interpretasi, ataukah sesungguhnya menunjukkan gejala perlu diterimanya "relativisme" kebenaran. Lepas dari soal itu, bagaimanapun wacana semacam itu sesungguhnya adalah jawaban bahwa kita memang sedang mengalami proses pluralisme dan pluralitas tersebut sebagai konsekuensi globalisasi, sebagaimana kita juga tidak bisa lagi mengelak akan pentingnya agama menjawab soal demokrasi dan demokratisasi.

Jawaban Islam terhadap munculnya pluralisme ini tentu saja suatu keharusan, mengingat dalam kehidupan sekarang yang dibutuhkan tidak hanya demokratisasi politik pada tingkat negara, tapi juga pentingnya demokratisasi dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Hanya saja, harus diingat bahwa dari proses globalisasi kapital sekarang ini yang sangat mengancam dasar-dasar humanisasi adalah: menguatnya pengaruh pasar (uang) dalam relasi-relasi pergaulan umat manusia dan melebarnya jurang antara yang miskin dan yang kaya. Oleh karena itu, kondisi objektif ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa ada mekanisme redistribusi sosial yang lebih adil dari asumsi ekonomi-politik, apalagi sekadar akan membasuh dengan sebelah tangan sambil menekankan toleransi dalam pluralis-

me "kebenaran" dari gagasan "*identity politics*" yang saat ini ramai disuarakan.

Dalam perubahan sosial yang timpang seperti itu, proses alienasi yang menyingkirkan banyak orang secara sosial ekonomi, rasanya janggal kalau agama tidak membaca kemunkaran sosial itu dengan menumbuhkan kesadaran (*self-conciousness)* yang secara hermeneutik lebih memihak kepada mereka yang lemah (*the objectifying hermeneutic of domination*), daripada sekadar menyediakan ruangan rohani dan spiritual yang harmonis bagi beragam orang yang ingin saleh dan tenang hidupnya, tanpa menumbuhkan gejolak iman yang risau terhadap penderitaan orang-orang yang lapar, tergusur atau tertindas seperti anak-anak jalanan.

Islam dan Politik Identitas

Salah satu pertanyaan penting bertautan dengan perkembangan politik dewasa ini ialah apakah Islam dapat dijadikan sebagai identitas kolektif dalam rangka gerakan prodemokrasi. Mengapa pertanyaan itu muncul, tentu karena beberapa sebab.

Pertama, pentingnya Islam sebagai legitimasi politik rakyat sudah terlalu kuat. Dan dalam kaitan itu, peran simbolis Islam sebagai perlawanan untuk pemberdayaan polilik rakyat sangat dibutuhkan. *Kedua*, sekarang ini terasa sekali kosongnya identitas politik yang dapat disangga sebagai bendera masyarakat luas, yang lintas primordial, yang benar-benar efektif mengartikulasikan kekuatan demokrasi. Biarpun tokoh seperti Mega-Amien-Gus Dur muncul sebagai simbol moralitas politik rakyat, tetap saja kosong bendera alternatif yang benar-benar dipercaya masyarakat untuk melakukan partisipasi langsung. Dengan demikian, rakyat tidak

bisa muncul ke permukaan secara sehat untuk ikut melakukan reformasi polilik. Bahkan, keresahan politik itu menjadi tertekan tanpa bentuk dan kini melebar luas menjadi rumor, disertai kejengkelan tak menentu tanpa pemimpin.

Islam sebagai bendera politik aliran di jaman Orde Lama, dan setelah Orde Baru menerapkan de-partai-polilisasi agama, tampaknya malah terjebak dalam agenda kesalehan. Dakwah Islam semakin bergebyar di mana-mana, sementara sentimen politik Islam sesungguhnya lebih mendukung kemapanan politik yang dianggap menguntungkan "islamisasi" dan pembangunan, yang hasilnya diharapkan bisa menguntungkan perbaikan ekonomi umat Islam.

Munculnya fenomena "Mega-Bintang" sesungguhnya merupakan gejala korektif, yakni agar Islam sebagai simbol politik yang kritis muncul dan dapat dibuka bagi siapa saja, tatkala perjalanan politik Islam dikhawatirkan lebih menguatkan sektor kekuasaan politik negara ketimbang memperkukuh otonomi umat dan rakyat yang semakin lemah.

Kebingungan politik Islam itu tercermin terutama ketika para ulama tidak lagi mampu membaca dan mendengarkan hati nurani dan penderitaan umat. Mereka lebih peka terhadap penderitaan para umara yang sedang menghadapi krisis keper-

cayaan pasar dunia dan krisis politik dalam negeri, tatkala kebijaksanaan pemerintah dalam hal-hal yang sangat prinsipil mengalami inkonsistensi di depan publik.

Tuhan yang Adil

Mungkinkah Islam kritis dan yang terbuka itu muncul? Saya kira, tanpa keberanian untuk melakukan dekonstruksi terhadap Islam yang "saleh" itu, dan menempatkan orientasi simbolis Islam dalam pergulatan politik kedaulatan rakyat dan kepentingan warga negara, Islam tidak mungkin kembali menemukan panggilan profetiknya yang paling dasar. Dalam konteks sekarang ini, Islam-saleh yang cenderung berbicara tentang anjuran pentingnya mencari pahala dengan intensitas ritus yang ekspresif itu sudah waktunya dikonfrontasikan tidak hanya dengan kebutuhan mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi apakah memang "wajah" Tuhan yang adil dan tidak menakutkan buat kaum yang tertindas itu ada dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat dewasa ini.

Karena itu, kekuatan Islam yang berani bicara "tidak" dalam melihat kemunkaran politik rasanya perlu dibuka seluas-luasnya, agar dakwah Islam tidak menjadi misionaris yang a-politis terhadap

tantangan kemanusiaan dan dehumanisasi politik. "Islam nilai" seperti itu tentu akan mampu melakukan konsolidasi moralitas menghadapi krisis intensitas politik; dan selanjutnya akan bisa diklaim oleh siapa saja yang merasa memiliki komitmen nilai yang sama, tanpa terhalang perbedaan agama atau kelompok.

Isu pentingnya Islam yang inklusif —dalam arti toleransi kepada umat lain—memang ada gunanya. Namun, dewasa ini rasanya kebutuhan adanya "Islam" sebagai bendera politik bersama dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial menjadi tuntutan yang mendesak. Islam di Indonesia sebagai mayoritas harus di depan, mengambil kepemimpinan prodemokrasi, mencari alternatif konseptual. Tidak saja alternatif agenda politik yang dikehendaki rakyat, namun yang lebih mendesak adalah bisakah dilahirkan wadah gerakan yang "bebas" dari kekotoran sejarah, untuk menghimpun segenap potensi dan energi masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat baru yang lebih adil dan demokratis.

Situasi Sumpek

Prakarsa ke arah itu—tanpa mengecilkan kelompok lain di luar Islam—akan lebih efektif jika

para pemimpin muda Islam mulai bekerja; dan sambil menunggu agenda pendek yang nantinya dapat memberi kemungkinan terbukanya politik. Dengan demikian, dimungkinkan mencari identitas politik yang sungguh-sungguh berwatak emansipatoris yang didasarkan pada kekuasaan hukum dan hak-hak asasi manusia.

Agenda politik sedikit panjang daripada sekadar memecahkan kebutuhan sekarang ini sudah barang tentu harus mulai dibicarakan oleh kelompok-kelompok Islam kritis dengan kelompok-kelompok kritis yang lain. Kalau tidak, apakah akan ada masyarakat baru yang berbeda dengan yang sekarang? Saya khawatir, kalau agenda sedikit panjang itu tidak dibahas, munculnya tokoh-tokoh vokal sekarang ini akan dianggap hanya karena situasi politik memang sangat sumpek—tanpa ada aliansi politik yang bisa menjadi harapan masyarakat dan kepercayaan internasional.

Semua orang tahu bahwa politik nasional sedang goyah akibat digoyang oleh "partai dollar Amerika". Tapi, kenapa tidak muncul alternatif kelompok politik di dalam negeri yang meyakinkan "partai moneter" itu bahwa mereka percaya akan terjadi reformasi politik yang tidak hanya mendukung efisiensi pasar tapi juga demokratisasi? Betapapun konfigurasi Mega-Bintang-Gus Dur secara

moral politik memang sangat memukau, jika tokoh-tokoh semacam itu ternyata belum menunjukkan agenda politik masa depan yang bisa dijadikan tempat berpijak bersama, tentu masih saja ada anggapan bahwa ketiga figur itu memiliki beban sejarah keumatan yang dimensi kulturnya lebih sarat perbedaan daripada toleransi. Umat di belakangnyalah yang lebih aktual kesadaran kulturnya tentang perlunya *civil society* sebagai cita-cita politik.

Dakwah Islam

Itulah yang sering disadari oleh Gus Dur, yang meragukan umatnya sendiri: apakah kaum *nahdhiyyin* (warga NU) telah siap dengan itu. Sebab, katanya, Korpri Nahdhatul Ulama, Korpri Muhammadiyah, bahkan juga Korpri Katolik, *toh* sama-sama berjuang masuk ke kekuasaan politik, minimal bisa jadi anggota DPR di Senayan, melalui Golkar.

Dari jaman liberal sampai Orde Baru yang tiba-tiba dilanda krisis moneter ini, kalau mau jujur, sebenarnya kesadaran politik yang benar-benar hendak memisahkan sentimen agama dan sentimen primordial, dan bagaimana menemukan konsep menempatkan hubungan yang tidak saling mengorbankan antara identitas pribadi dan identitas sebagai warga negara, masih belum jelas. Biarpun dis-

kursus Islam lebih maju membicarakan pluralisme sosial, wajah politik rasanya tetap diwarnai dengan semangat aliran. Dakwah Islam telah menjadi payung tatkala partai-partai berbendera Islam lemah.

Namun, islamisasi dalam semangat itu lebih besar energinya, sehingga munculnya orang-orang saleh sektarian memang jumlahnya lebih besar, apalagi setelah sebagian besar orang kaya baru di luar tradisi gerakan Islam bergabung—bukan secara politik, melainkan sebagai kelompok yang menganggap Islam bagian dari gaya hidup. Kelompok yang terakhir itu ikut berbagi sentimen Islam tersebut, namun jelas tidak dalam relasi politik dan kekuasaan, tapi dalam identitas konsumtif, karitatif, dan semiotif yang islami.

Itulah kekuatan-kekuatan sosial yang akhir-akhir ini secara akumulatif menghasilkan Islam "gebyar". Apalagi, setelah kooptasi Islam sebenarnya mereka menjadi pemilik dan sponsor semarak Islam melalui berbagai saluran media ekspresif, yang mengemas Islam dalam paket hiburan, perayaan, bahkan sampai pada produk iklan. Dengan demikian, kata orang, sekarang ini tidak pernah ada waktu yang luang bahwa asma Allah begitu seringnya disebut dalam acara televisi oleh para artis dan dai kondang melebihi disebutnya di

masjid-masjid. Namun, apakah sifat Allah yang adil pernah didiskusikan dalam dakwah secara serius sebagai agenda politik umat menghadapi penguasa yang dzalim?

Tasbih yang Mahal

Dan inilah Islam yang menjadi agama dakwah, dalam arti telah pindah dari partai Islam—karena dibubarkan—tapi tidak kembali kekuatannya ke pesantren atau madrasah-madrasah. Melainkan, mereka menjadi program berdzikir di televisi, tadarus di hotel-hotel berbintang lima, dan menjadi simbol kaligrafi dan tasbih yang mahal, yang digantung bersama barang seni yang lain.

Islam kritis yang dibuka itu tentu saja tidak berarti menghalangi umatnya untuk lebih saleh. Namun, kesalehan sosial, dimensi yang lebih menjadi ijtihad umum, harus bersama-sama dikerjakan bersama masyarakat. Soal mengatasi kemunkaran politik, umat Islam tidak boleh ragu-ragu bahwa hal itu merupakan tantangan sejarah yang memerlukan berserikat dengan kekuatan lain; dan tidak bisa dipandang hanya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang khas Islam. Dan tantangan politik sekarang memang hanya bisa dihadapi jika ada front-kemanusiaan yang lebih besar, bukan hanya

dalam kesadaran pan-nasional islamisme yang eksklusif.

Itulah alternatif politik Islam yang memungkinkan menjawab kebutuhan reformasi politik dewasa ini. Di satu segi, Islam harus berani meninggalkan kesadarannya menjadi bendera kelompok, di segi lain juga berani melepaskan bebannya sebagai cita-cita ideologi besar *(grand narrativie)*—cita-cita yang terlalu ambisius untuk mengedepankan alternatif ideologi politik: *Islam is solution.*

Islam dalam kaitan itu sangat dibutuhkan perannya sebagai "senjata" simbolis yang mampu berhadapan dan memihak secara kritis, yakni tatkala perebutan makna-makna terjadi antara mereka yang menindas dan mereka yang membutuhkan otonomi dan pemberdayaan politik. Sebagai penguatan resistensi itu, tidak lain Islam harus dikembalikan orientasinya ke umat, menjadi simbol solidaritas bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tersingkir dan kalah, sekurang-kurangnya muncul dalam "do'a politik" yang menyadarkan hak-hak kaum *mustadh`afin.*

Anak-Anak Muda

Saya melihat potensi Islam kritis seperti itu mulai muncul di kalangan para pemimpin dan

cendekiawan yang muda-muda. Mereka itu lahir dari proses yang panjang. Kuatnya politik negara membuat mereka "matang" bersama lemahnya politik rakyat. Potensi ini secara intelektual tidak hanya dibentuk oleh kesadaran "fiqh *siyâsah*" yang lama dan tradisional. Mereka juga mengenal pikiran-pikiran dan gagasan politik modern, serta berkenalan dengan wacana teori gerakan sosial yang bereaksi terhadap pasar kapitalisme dunia.

Itulah gejala anak-anak muda Islam yang keluar dari semak subkulturnya masing-masing. Hanya, sampai sekarang, mereka belum memiliki jaringan yang baik, yang akan menjadi jembatan menuju terbentuknya suatu lapisan kepemimpinan muda pada masa depan, yang lebih siap dan mempunyai agenda yang sama. Tidak mustahil, jika lapisan Islam muda yang kritis itu bisa menemukan bentuk organisasinya yang baik bersama dengan potensi lapisan kritis dari kelompok di luar Islam yang lain, mereka bisa menjadi harapan terjadinya perubahan politik dalam jangka yang panjang, mengikuti gebrakan reformasi politik jangka pendek sekarang ini.

Sebab, kalau tidak, jangan harapkan Islam bisa menjadi alternatif politik identitas yang prodemokrasi, apalagi kalau ruh Islam itu semakin ditenggelamkan oleh mereka yang rindu kekuasaan atau mereka yang asyik-masyuk dengan gebyarnya konsumerisme yang saleh.

Kebangkitan Islam dan Tantangan Kemanusiaan Universal

Sejak runtuhnya rezim komunis di Rusia dan Eropa Timur, merebak wacana di Barat untuk mempertimbangkan Islam sebagai saingan. Bahkan tidak sekadar saingan, tapi Islam bisa jadi akan menjadi ancaman bagi peradaban Barat. Memang cukup beralasan bila Barat takut melihat gejala kebangkitan Islam yang merebak di mana-mana—dalam istilah Barat disebut gerakan "fundamentalisme Islam". Ya, bagaimana tidak, kaum islamis ini cukup lantang meneriakkan slogan Islam sebagai alternatif dan sekaligus menolak Barat, baik sebagai kekuatan hegemoni politik dan ekonomi maupun sebagai aras dan perspektif berpikir.

Harus diakui, sebenarnya bukan hanya di Timur Tengah yang mempunyai pengalaman sejarah yang tidak enak dengan Barat, melainkan hampir seluruh negeri Islam. Sejarah kolonialismelah penyebab paling penting yang menyakitkan,

yang kemudian membangkitkan Islam sebagai bahasa perlawanan di mana-mana. Islam dalam perkembangan ini tidak lagi bertahan sebagai identitas kultural, namun bersamaan dengan munculnya rasa nasionalisme yang membara, Islam menjadi ide politik yang terbuka untuk pemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, hubungan Islam dan nasionalisme telah menjadi kesadaran politik kuat yang membekas dalam perlawanan panjang terhadap hegemoni Barat. Tentu saja trauma sejarah seperti itu tidak mungkin segera dapat dihapus dan dilupakan.

Segera setelah negeri-negeri Islam merdeka, harapan yang paling tinggi dalam rangka mengisi kemerdekaan itu adalah kesejahteraan. Hal ini masuk akal karena kaum muslim di mana-mana menghadapi kemiskinan. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa ideologi sosialisme telah populer di kalangan bangsa Arab karena sosialisme dianggap merupakan tidak saja utopian sosial yang paling menjanjikan buat bangsa-bangsa yang miskin, tapi juga sebagai lawan Barat yang bercorak kapitalistik. Suatu bentuk ideologi yang berlawanan dengan karakter Islam yang pada dasarnya komunitarianistik, sehingga sosialisme menjadi dekat bagi kaum muslim, baik secara emosional apalagi secara politik. Tak heran bila para pemikir Islam mencoba menyatukan nilai-nilai Islam yang memihak keadilan sosial itu dengan perspektif sosialisme, misalnya

melalui berbagai rumusan baru, dan sosialisme-Islam kemudian muncul sebagai harapan—sebagai impian ideologis untuk menyelesaikan kemiskinan.

Sudah tentu, rekonstruksi perjumpaan Islam dan Barat dalam sejarah yang panjang tidak dapat disederhanakan seperti itu. Dalam masa-masa sulit akibat kolonialisme dan juga masa-masa menggu-ritanya pengaruh kapitalisme, negeri-negeri Islam juga menerima transfer teknologi dan ilmu penge-tahuan dari Barat. Hal ini merupakan konsekuensi dari proses modernisasi yang tidak mungkin diben-dung dan melebar ke sudut dunia mana pun. Namun di jaman "sosialisme-Islam" masih berkuasa akibat masih kuatnya perang dingin, pilihan kaum muslim untuk menyelesaikan kemiskinan *ya* tidak lain bertumpu pada harapan sosialisme itu, suatu ideo-logi yang tidak memiliki cacat kolonialisme, biar pun sesungguhnya sosialisme sendiri sebelumnya tidak terlalu peduli dengan gerakan-gerakan nasio-nalisme-Islam.

Harapan paling besar, dengan mimpi kebang-kitan Islam, muncul tatkala negeri-negeri Arab dan Islam memiliki sumur minyak sebagai salah satu energi yang paling penting bagi industri Barat. Barangkali inilah tanda-tanda baru kebangkitan Islam dan umat Islam kalau saja pemberian minyak dari Allah itu dapat digunakan sebagai senjata me-

lawan ketergantungan Barat sekaligus sebagai sarana untuk menyejahterakan kaum muslim yang miskin di mana-mana. Dan bersamaan dengan terbitnya minyak dari sumur-sumur di padang pasir itu, kaum muslim merayakan harapan baru, dengan semangat baru, semangat yang ditimba dari peringatan tahun Hijriyah. Suatu peringatan yang tidak saja memberi arti sejarah, lebih penting dari itu, sebagai tonggak harapan akan datangnya jaman baru, jaman kemakmuran dan kemajuan bagi kaum muslim yang terpuruk selama ini akibat penjajahan dan kemiskinan.

Walhasil, harapan itu ternyata tidak segera kunjung tiba. Inilah gerangan salah satu sebabnya. Yakni, ternyata sosialisme-Islam itu tidak lagi menjadi kekuatan rakyat, tidak lagi menjadi utopian sosial, namun telah menjadi ideologi rezim politik, rezim kekuasaan yang korup di mata kepentingan rakyat. Di negeri-negeri Islam, yang berkuasa adalah rezim kekuasaan yang tak henti-hentinya saling bermusuhan satu sama lain. Rakyat, kaum muslim yang miskin itu, tidak mempunyai perwakilan yang kuat dalam pengambilan keputusan politik, apalagi ikut memutuskan untuk apa hasil minyak yang merupakan berkah dari Allah itu dijual ke negara-negara industri Barat. Dalam proses berikutnya, bahkan rakyat beranggapan bahwa sumur-sumur itu sebenarnya tidak lagi milik mereka, sebab telah

digadaikan oleh rezim-rezim yang berkuasa untuk kepentingan industri Barat yang melalui mekanisme pasar kapitalisme global, apalagi memberikan berkah kepada kaum muslim yang miskin di sekitarnya, bahkan hal itu ikut memperpanjang penderitaan kemiskinan struktural yang mereka alami selama ini.

Inilah gambaran, sekaligus mungkin cara yang bisa menerangkan mengapa semangat Hijriyah yang semula didorong sebagai titik harapan untuk kebangkitan Islam, semakin lama semakin membawa kekecewaan bersamaan dengan redupnya harapan terhadap gagasan sosialisme itu sendiri. Orang-orang muda, kaum intelektual muda terdidik yang berasal dari keluarga-keluarga miskin yang baru jadi sarjana, yang tinggal di kota-kota dan kariernya belum mapan, sangat merasakan tentang kekecewaan proses politik ini. Dan merekalah kemudian mengambil alih kepemimpinan dari kaum muslim yang resah ini untuk memulihkan "harga diri" politik Islam, sambil menjaga moralitas perjuangan melawan Barat yang dianggap tidak adil selama ini. Mereka melakukan hal itu dengan berbagai slogan, baik dengan pernyataan "hanya dengan syari'ah" kita akan ditolong Allah atau seruan untuk menjauhi pikiran-pikiran *gharbiyyah* (dari Barat) yang sesat dan menyesatkan. Harus dipahami, memang, bahwa Barat yang hegemonik

kadang-kadang memang tidak mau memberi ruang sedikit pun bagi orang lain, apalagi melawan, sekadar berpikir yang berbeda sebagai alternatif saja pun tertutup. Akibatnya, tidak terjadi proses dialog peradaban yang sehat, apalagi dalam hal proses dialog politik dan perekonomian yang saling menguntungkan. Orang lain, termasuk kaum muslim, seperti disudutkan dalam pilihan yang sulit, apakah harus "meng-Islamkan" pikiran dan kehendak Barat atau melawannya sebagai musuh Barat yang kalah.

Kalau semangat kebangkitan Islam harus diletakkan dalam skema dikotomis, "Islam" melawan "Barat", rasanya memang tidak bisa lain kecuali harus ada sikap melawan, baik dari segi peradaban maupun dari segi politik yang jelas, kita berdiri di sebelah yang mana. Namun, persoalannya, kini siapa yang kita anggap "Barat" dan siapa yang kita anggap "Islam"? Peta ini sekarang sungguh sangat membingungkan, tatkala kesadaran umat manusia sudah bergulir sangat global dan tantangan kemanusiaan serta perjuangannya tidak lagi bisa disederhanakan dalam skema Islam melawan Barat. Islam, apalagi sikap "yang islami", bukanlah lagi milik umat Islam sendiri, dan kata "Islam" telah menunjukkan realitasnya yang plural atau majemuk. Sebagai identitas agama, "Islam" memang singular. Namun, sejak umat Islam memiliki budaya dan tra-

disinya, "Islam" merupakan entitas yang beragam. Oleh karena itu, sulit kiranya dalam kesadaran umat manusia yang global sekarang ini untuk mencari, apakah yang unik dan khas sebagai kesadaran umat Islam. Begitu juga "Barat". Selain soal geografi dan pusat kapitalisme yang menyebarkan "*the consumer culture*", dilihat dari kesadaran peradaban, sesungguhnya "Barat" bukanlah sebuah entitas yang satu dan monolitik. Di kalangan umat Islam, banyak sekali yang antidemokrasi dan juga tidak sedikit yang berjuang secara sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi berdasarkan keyakinan Islam. Begitu pula di "Barat", bangsa yang sering dikatakan sebagai pusat peradaban itu, mental dan pikirannya sering kali tidak beradab, terlalu melawan humanisme yang mereka junjung selama ini.

Kalau begitu, terus bagaimana? Tidak lain kita harus membawa pemahaman dan kesadaran tentang kebangkitan Islam itu sebagai bagian dari harapan umum, harapan umat manusia untuk keluar dari dunia yang represif sekarang ini. Bukan sebaliknya, malah menempatkan harapan tahun Hijriyah sebagai kebangkitan sektarianistik kemanusiaan. Sebab, tidak jamannya lagi Islam dan agama lain untuk mendefinisikan bahwa kebangkitan agama adalah identik dengan kebangkitan peradaban yang baru, tanpa masing-masing agama mentransen-

densikan diri pada tantangan kemanusiaan yang universal.

Dan, saya kira, tantangan kemanusiaan universal itu yang harus dihadapi bersama, Islam dan agama lain, adalah kemiskinan yang merupakan indikasi paling dekat dengan soal kekufuran, suatu proses degradasi kemanusiaan. Inilah persoalan besar umat manusia, tatkala sejarah telah mengantarkan umat manusia dapat menguasai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan agama-agama telah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kemajuan akal dan pencarian spiritual modern, namun penderitaan umat manusia akibat redistribusi sosial tidak merata tetap saja menyisakan wajah kehidupan yang buram di mana-mana.

Sekarang bukan jamannya lagi membaca peta surga-neraka dengan sudut pandang yang lama, yang seolah-olah batasnya identik dengan batas nama agama yang dipeluk umat manusia, sebab dunia yang baru gambar sosial dan politiknya semakin kabur dengan rumitnya batas-batas kepentingan ekonomi dan politik sekarang ini. Biarpun begitu, ada satu hal yang semakin jelas dan tidak bisa dikaburkan, yaitu: "kemunkaran sosial". Itulah musuh semua agama yang paling esensial yang mesti dilawan oleh Islam bersama-sama dengan kekuatan religius lainnya. Dan kemunkaran sosial

itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh mencari ke Timur atau ke Barat, sebab di mana arah kita menghadap di sana pastilah ditemui ketimpangan sosial itu akibat meluasnya gejala kontemporer dari proses marginalisasi kemanusiaan di mana-mana.

Oleh karena itu, marilah setiap peringatan tahun Hijriyah kita jadikan momentum untuk melakukan refleksi Islam tentang kemanusiaan, dan bukan sebaliknya, meneguhkan kesadaran yang justru secara subjektif memisahkan diri dari realitas objektif tentang penindasan dan perjuangan umat manusia sebagai komitmen Islam yang paling dasar.

Kebangkitan Islam dan Gerakan Sosial Baru

Katarsis Kebangkitan

Wacana kebangkitan Islam selama ini lebih merupakan isu politik di kalangan pemimpin dan elitnya. Secara emosional, mungkin kebangkitan Islam itu merupakan harapan Islam di kalangan bawah yang merasa rentan dari segi sosial ekonomi mereka. Karena itu, sebagai isu politik, tentu saja kebangkitan Islam sangat mendominasi. Namun, kalau hal itu ditetapkan juga untuk menjadi tumpuan emosional atau semacam impian, maka yang dimaksud kebangkitan Islam itu adalah harapan akan terwujudnya keadilan sosial. Masalah pertama yang muncul di seputar isu kebangkitan Islam ini adalah kandasnya wacana ini pada semacam katarsis.

Sama halnya dengan jargon syari'at Islam. Jika syari'at dilaksanakan maka ekonomi kita akan ditolong oleh Allah. Pada tingkat retorik, ini sangat menarik, tapi dikhawatirkan akan menjadi satu

bentuk katarsis. Artinya, sambil melarikan diri dari keadaan objektif, semua masalah diletakkan pada kehendak Allah. Apakah para pemimpin Islam punya pemahaman yang lebih jelas mengenai persoalan objektif yang dihadapi umat. Jadi, jangan sampai dibuat sebagai ilusi.

Ada dua soal di sini: kemampuan kaum muslimin di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan visi serta gerakan keadilan sosial. Penguasaan iptek tidak serta merta bisa menyelesaikan ketimpangan sosial. Dunia ini sudah demikian maju. Betapapun majunya iptek tetapi soal kemiskinan belum tertanggulangi. Bahkan, ketimpangan struktural kian melebar. Pada skala internasional ada pembedaan Utara-Selatan.

Sederet jargon muncul, seperti kebangkitan Islam itu sendiri, *Islam is solution*, atau *back to syari'ah.* Tanpa kemampuan membaca dan melihat proses globalisasi, jargon itu akan menjadi sekadar impian belaka. Tokoh-tokoh dan elit Islam akan kesulitan menemukan bentuk pemberdayaan karena kehilangan sejenis peta mengenai masalah-masalah riil keumatan. Karenanya, yang lahir dalam benak masyarakat adalah kebangkitan bersifat simbolik, kuantitatif, dan amat dangkal. Contohnya, kebangkitan Islam diukur dengan semaraknnya kehidupan yang ritualistik. Kelas menengah bisa menjalankan

ibadah haji dengan paket-paket yang bergengsi, tarawih-tarawih bergengsi di hotel, rumah ibadah berdiri sangat monumental dari segi arsitekturnya dan sebagainya.

Apa artinya jumlah rumah ibadah banyak kalau kemudian jarak antara rumah ibadah dan kaum miskin dekat, tetapi dari segi kesadaran keislaman kita jauh. Problem yang dikatakan Clifford Geertz dulu bahwa ada abangan, santri, dan priyayi dalam kebudayaan masyarakat jadi benar. Kaum abangan, santri maupun priyayi, masing-masing terdapat jarak dengan kesadaran keislaman meskipun boleh jadi berdiam dekat masjid dan akrab dengan simbol-simbol keagamaan. Umumnya orang abangan itu dulunya adalah para petani miskin. Islam kaum abangan adalah melaksanakan tradisi yang ditempeli dengan nuansa bersimbol Islam, walaupun kesadaran berislamnya amat tipis. Kaum santri juga seakan-akan cukup memilih peran sebagai penceramah, pengkhotbah, atau pembaca do'a pada acara yang dilakukan kaum abangan maupun priyayi.

Sebenarnya, paham kaum abangan merupakan sejenis ungkapan keislaman kaum proletar. Kalau mau jujur, orang-orang miskin yang sepanjang hidupnya menjadi konsumen fatwa-fatwa rohani dan semacamnya, sementara dari pesantren adalah haji-haji yang menjadi donatur pesantren, tampak

dalam suasana yang hingga kini diwarisi dalam masyarakat pedesaan dan kaum pinggiran. Fenomena pemberontakan PKI sebenarnya lebih merupakan pertentangan kelas sipil. Gerakan tersebut awalnya dimulai di Jawa Timur dengan aksi sepihak perebutan tanah-tanah persil perkebunan dan sebagainya.

Mau tidak mau harus diakui bahwa ada hubungan antara jarak sosial dan jarak spiritual. Ini persoalan yang kritikal. Perkembangan teknologi dan sains menyebabkan orang-orang Islam tidak awam lagi, anak-anak muda sudah dapat menguasai *engineering*, banyak yang bergelar akademik tinggi, menguasai komputer sains dan seterusnya. Namun, apakah hal-hal tersebut berbanding lurus dengan perkembangan kesadaran terhadap pembelaan rakyat, penegakan kebenaran, dan pemerataan kesejahteraan secara adil?

Setelah jatuhnya sosialisme yang beberapa ajarannya dekat dengan Islam, seperti kepemihakan terhadap keadilan sosial, *committed* terhadap masyarakat dan menganut model keumatan komunitarianisme, maka gerakan-gerakan sosial dianggap telah kalah. Karena itu, jika kita hanya menggunakan slogan Anti-Barat untuk membangun kekuatan bersama dengan yang lain, akhirnya kita melawan Barat tanpa senjata.

Oleh karena itu, dalam rangka kebangkitan ini, orang Islam harus menjadi bagian kekuatan alternatif dunia. Umat Islam harus berkompetisi dengan gerakan ideologi lain misalnya jargon *The End of History* untuk melawan kapitalisme Barat. Suatu arus dunia yang kapitalistik dan materialistik telah menghasilkan *consumer culture* di mana-mana. Apakah umat hanya akan mengakses *consumer culture* atau orang-orang Islam ini ingin ikut membangun *the new comunity of civilization* (satu komunitas peradaban masyarakat yang baru).

Itulah sebenarnya tantangan masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai kebangkitan Islam itu hanya menjadi "isu khotbah" saja. Umat Islam perlu banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sebagian umat Islam lainnya yang telah mengokohkan dirinya, seperti Malaysia. Bagaimanapun, Malaysia sudah dihitung oleh dunia. Umat Islam terutama elit-elit intelektual, ulama dan para aktivis, terlebih lagi politisi dan orang yang punya kesempatan berada dalam lingkaran pengambil kebijakan, agar mengembangkan SDM, untuk menciptakan kekuatan dan perimbangan terhadap globalisasi itu. Jadi, kita tidak boleh sekadar apriori terhadap berbagai proses globalisasi, tetapi harus menjadi lebih proaktif dengan belajar dari pengalaman dan bekerja sama dengan orang lain.

New Social Movement

Ketika muncul isu struktural atau perjuangan kultural, itu masih tarkait dengan jaman Cak Nur yang mengeluarkan isu teologi politik: *"Islam Yes, Partai Islam No."* Jargon ini dikemukakan untuk mengimbangi anggapan masyarakat dan tokoh-tokoh Islam bahwa nasib umat Islam hanya bisa diperjuangkan melalui pintu politik (pendekatan struktural). Padahal ruang kultural Islam itu sebenarnya juga ruang yang sangat penting, apalagi kini banyak pihak yang sudah memikirkan perlunya memperkuat *civil* Islam.

Oleh karena itu, jargon struktural dan kultural itu harus direvisi. Keduanya sulit dipisahkan. *Pertama,* tatkala kondisi objektif menunjukkan bahwa peran negara itu sangat penting—biarpun negara sebenarnya sudah dilucuti dengan pasar globalisasi—tetapi kalau negeri seperti Indonesia yang orang miskinnya begitu besar dan tidak mempengaruhi regulasi pada tingkat negara untuk memihak pada orang-orang miskin (semacam *soft sosialism*), juga akan repot. Seandainya terjadinya perubahan diharapkan hanya dari hasil kerja LSM-LSM yang kecil-kecil, maka *civil* Islam ataupun *civil society* sebagai agregasi politik itu, sangat lemah. Meski demikian, haruslah tetap diakui bahwa LSM-LSM melalui pendidikan politiknya untuk mempersiap-

didiknya untuk mengambil peran sosial dalam masyarakat, sebab mereka lebih dipersiapkan untuk menjadi pekerja atau buruh pasar kerja ketimbang sebagai subjek yang mandiri dan kreatif. Ketika ekonomi pasar kapitalisme mulai surut, dan pasar kerja menjadi lesu, maka anak-didik akan menjadi korban kelesuan tersebut. Sementara itu, ijazah dan wisuda yang telah mereka laksanakan, hanya menjadi tanda diawalinya masa anak itu dalam jumlah pengangguran kaum terdidik di Indonesia yang makin meningkat.

Dari mana awal mula (kalau harus dibilang letak kekeliruan) praktik pendidikan selama ini? Sudah tentu akar permasalahannya cukup rumit. Namun, dari perspektif pedagogis kritis, saya kira, awal mulanya ialah anggapan kita dalam praktik belajar-mengajar selama ini bahwa "mendidik" hampir disamakan dengan upaya "mencekoki" atau proses memindahkan ilmu pengetahuan kepada anak didik sebanyak-banyaknya. Akibatnya, anak menjadi pasif atau bahkan sebagai subjek manusia secara pedagogis telah mati, karena mereka hanya menjadi "konsumen" dan bukan "produsen" ilmu pengetahuan. Mendidik bagaikan menjalani instruksi kurikulum, menjadi kegiatan rutin yang prosedural, menempatkan otoritas guru melebihi batas sebagai figur, sambil mengorbankan potensi kreatif dan kritis anak didik yang seharusnya menjadi modal

pedagogis yang sangat penting. Oleh karena semuanya didasarkan pada basis kurikulum atau silabus pengajaran, maka anak didik tumbuh dan berkembang dalam format pengajaran di mana format pertumbuhan selanjutnya dibentuk oleh "dunia lain" yang kadang-kadang liar di luar tembok-tembok sekolah.

Sesungguhnya, tidak jauh berbeda dengan soal pendidikan pada umumnya, salah satu kritik yang mungkin sudah hampir klasik tentang pendidikan (Islam) ialah belum ditemukannya pengetahuan pedagogis agama yang memadai. Apa yang selama ini dilaksanakan di sekolah-sekolah tentang pendidikan agama mungkin tidak lebih dari proses belajar-mengajar agama. Bahkan hal itu mungkin lebih tepat disebut "transmisi pengetahuan agama" yang melalui cara didaktis-metodis seperti halnya pengajaran umum.

Memang harus diakui bahwa pencarian ke arah metodis pengajaran agama sudah sering dilakukan melalui eksperimentasi-eksperimentasi. Akan tetapi —kalau tidak salah—semuanya itu lebih didasarkan pada basis pedagogis umum yang berasal dari filsafat pendidikan model Barat. Oleh karena menemukan pedagogis Islam, maka barangkali yang harus kita lakukakn ialah merumuskan lebih dahulu tentang filsafat pendidikan Islam. Itulah yang kemudian

dijadikan dasar untuk mengembangkan cara-cara teknis pendidikan, baik dalam lingkup sekolah maupun keluarga dan masyarakat.

Misalnya, bagaimana gambaran filosofi konsep nilai yang selama ini kita sebut anak "yang saleh"? Atau, barangkali kita bisa mulai merumuskan secara filosofis siapa "insan kamil" itu, suatu konsep dasar tentang manusia ideal menurut Islam. Ini kemudian dapat dijadikan acuan model pedagogis dalam menyelenggarakan pendidikan Islam.

Jika perumusan filosofis yang menjadi dasar pendidikan Islam itu kita temukan, maka bentuk pendidikan Islam mungkin akan menjadi bulat. Yakni, pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan agama Islam kepada anak didik dalam paket yang telah disistematisasi oleh para ulama terdahulu. Misalnya, pengetahuan tentang tauhid, akhlak, fiqh yang terkotak-kotak, yang parsial.

Paket pengetahuan agama yang sistematis ini bisa jadi membuat anak didik mempersiapkan agama dengan menginternalisasikannya, sehingga seolah-olah pengetahuan agama merupakan sistem pengetahuan yang ketat, bagaikan disiplin ilmu tersendiri. Akibatnya, dalam pertumbuhan anak-anak, agama tidak muncul sebagai kerangka spiritual, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar etika hidup, etos, dan sebagai pedoman moral sehari-hari.

Berdustalah mereka yang hanya menikmati
bersembahyang, namun melupakan
nasib orang-orang yang tersingkirkan
dan menderita secara sosial.

ISBN 979-8451-18-X